**SIARAN PERS**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

**PERWAKILAN PROVINSI ACEH**

**Opini WDP untuk LKPD Kab. Pidie Jaya TA 2014**

**Banda Aceh, Kamis ( 7 Mei 2015 ),** BPK Perwakilan Provinsi Aceh melakukan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kab. Pidie Jaya Tahun Anggaran 2014 yang merupakan penyerahan LHP Kedelapan di wilayah Provinsi Aceh.

BPK menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Kab. Pidie Jaya dikarenakan telah menyerahkan laporan Keuangan TA 2014 (unaudited) sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebagai implementasi dari tiga paket Undang-Undang tentang Keuangan Negara, yaitu Undang­-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaandan TanggungJawab Keuangan Negara.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, BPK memberikan opiniatas LKPD Kab. Pidie Jaya untuk Tahun Anggaran 2014 adalah **"Wajar Dengan Pengecualian"** atau *"Qualified Opinion"*.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih terdapatnya beberapa kelemahan yang berkaitan dengan SPI maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:

1. Kelemahan dalam system pengendalian intern:
2. Pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah belum memadai;
3. Realisasi belanja modal pada Dinas Pekerjaan Umum digunakan untuk membayar kewajiban kepada Pihak Ketiga yang tidak tercatat pada neraca;
4. Belanja hibah dan bansos dalam bentuk barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga belum dikonversi sesuai SAP;
5. Penatausahaan aset tetap belum memadai; dan
6. Pengelolaan dan penatausahaan PAD belum memadai.
7. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan:
8. Terdapat realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2014 pada Sekretariat Daerah digunakan untuk membiayai kegiatan TA sebelumnya;
9. Tujuh paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dilakukan finalisasi nilai kontrak dan kekurangan volume;
10. Terdapat indikasi persekongkolan dalam proses pengadaan melalui ULP dan Pokja; dan
11. Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Rawat Inap RSUD kurang volume.

Keberhasilan fungsi pemeriksaan yang di lakukan oleh BPK tidak semata-mata di lihat dari banyaknya temuan, tetapi juga bagaimana BPK dapat mendorong agar tata kelola keuangan yang lebih baik dan dapat meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah. BPK berharap agar Pemerintah Kab. Pidie Jaya segera menyusun dan melaksanakan beberapa langkah strategis yang dituangkan dalam rencana aksi (action plan).

***(SUBBAG HUMASDAN TU KEPALA PERWAKILAN)***

***Informasi Lebih Lanjut :***

***Sub Bagian Humas danTU Kepala Perwakilan***

*Telp. 0651-32627*

*Faks. 0651-21166*